

**DELIBERASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PETAI BARU
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2015-2016**

Oleh: Ricky Pratama

Email: rickypratama1996@yahoo.com

Pembimbing: Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Deliberation of development planning is a process or way of involving individuals in making decisions in deliberations. The form of a new space for the success of the village planning meeting is the establishment of a deliberative forum, where citizens talk based on issues and needs that are based on people's knowledge and capacity. The purpose of the study was first, to find out how the deliberation process of hamlet meetings and the results of village hamlet mesrenbang. Second, to find out the musrenbang deliberation process and how to encourage community involvement in the process of developing village development planning. The location of this research was conducted by the New Petai Village. The type of research used is qualitative research methods. Data collection techniques are done by interviewing and observing. The results of the musrenbang research conducted by the Petai Baru Village are in accordance with the rules, namely through community meetings at the hamlet level and then towards the village planning meeting. However, deliberation in development planning here has not been carried out by the people of Petai Baru Village. This can be seen in the attendance list and proposals at the New Petai Village Musrenbang.

Keywords: Community Involvement, Independence, Deliberation Decisions.

PENDAHULUAN

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal didesa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat di lihat sebagai upaya mempercepat pemban pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015, Pasal 23 ayat 1, Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa disebutkan bahwa Musyawarah desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap warga Desa berhak untuk hadir sebagai peserta Musyawarah Desa. Musrenbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa) merupakan forum formal di Desa, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa untuk menemukan dan mengenali masalah, potensi, kebutuhan tantangan eksternal dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Musyawarah desa diselenggarakan dengan maksud untuk memfasilitasi keterlibatan berbagai pihak melalui proses dialog, berdiskusi dan memformulasikan berbagai persoalan yang dihadapi terkait kebutuhan, masa depan dan rencana

pembangunan desa (Yansen, 2014:149).

Tabel 1
Daftar Hadir Masyarakat Dalam
Musrembang Desa Petai Baru Tahun
2015-2016

| No | Jumlah | Tahun | Jumlah | Tahun | Klasifikasi |
|----|--------|-------|--------|-------|--------------------|
| 1 | 12 | 2015 | 9 | 2016 | Pemerintah Desa |
| 2 | 8 | 2015 | 3 | 2016 | Lembaga desa |
| 3 | 3 | 2015 | 3 | 2016 | Tokoh Masyarakat |
| 4 | 1 | 2015 | 1 | 2016 | Tokoh Pemuda |
| 5 | 1 | 2015 | - | 2016 | Tokoh Agama |
| 6 | 5 | 2015 | 1 | 2016 | Kelompok Perempuan |
| | 30 | 2015 | 17 | 2016 | |

Sumber : Data Olahan Peneliti 2018

Pada penjelasan tabel diatas dapat dilihat jumlah yang hadir pada tahun 2015 sebanyak 30 orang dari 80 orang yang di undang, sedangkan pada tahun 2016 yang hadir sebanyak 17 orang dari 80 orang yang di undang. Satu hal permasalahan yang terlihat pada tabel ini yakni kehadiran tokoh masyarakat yang mengalami penurunan. Dimana idealnya tokoh masyarakat yang hadir seharusnya semakin meningkat, karna pemerintahan desa sudah berusaha meningkatkan jumlah masyarakat yang hadir, namun tidak ditanggapi secara luas oleh masyarakat. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Rekapitulasi hasil pendataan masyarakat desa tahun 2016 tercatat penduduk Desa Petai baru sebanyak 1.527.

Tabel 2
Data Usulan MusrebangDes Petai Baru
Tahun 2015

| No | Data Usulan 2015 |
|----|--|
| 1 | Penerangan jalan |
| 2 | Pembangunan pos ronda |
| 3 | Pembangunan lapangan volly |
| 4 | Pembanguna drainase |
| 5 | Perbaikan MDA |
| 6 | Pembanguna KUD |
| 7 | Batas desa |
| 8 | Pembangunan puskesdes |
| 9 | Seminisasi jl. Manggis |
| 10 | Seminisasi jl. Jambu |
| 11 | Seminisasi jl. Tranbaru |
| 12 | Seminisasi jl. Jeruk |
| 13 | Seminisasi jl. Indramayu |
| 14 | Pupuk sawit berkualitas |
| 15 | Pembuatan jalan baru |
| 16 | Pembuatan tempat pembuangan sampah |
| 17 | Pengembangan pertanian |
| 18 | Bantuan alat keterampilan bagi karang taruna |
| 19 | Lampu penerangan dusun Madu raja |
| 20 | Lampu penerangan dusun Suka jadi |
| 21 | Penyuluhan PHBS |
| 22 | Pembuatan Parit jl. Jambu |
| 23 | Pembuatan parit jl.manggis |
| 24 | Pembuatan parit jl.jeruk |

Sumber : Hasil Musrenbangdes Petai Baru Tahun 2015

Tabel di atas merupakan usulan dari masyarakat Desa Petai Baru pada musrenbangdes 2015, terdapat 24 usulan yang merupakan aspirasi masyarakat desa, hanya empat usulan yang mampu di realisasikan oleh pemerintah Petai Baru, di antaranya ialah pembangunan puskesdes, semenisasi

jalan manggis, semenisasi jalan jambu, semenisasi jalan jeruk. Empat usulan yang realisasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, tetapi terdapat masalah lain yaitu dari 24 usulan terlalu sedikit yang dapat di realisasikan pemerintah Desa Petai Baru.

Tabel 3
Data Usulan MusrebangDes Petai Baru
Tahun 2016

| No | Data Usulan |
|-----|------------------------------------|
| 1. | Pembangunan KUD |
| 2. | Pembangunan PAUD |
| 3. | Pembangunan balai desa |
| 4. | Pembangunan lapangan voli |
| 5. | Penerangan jalan utama |
| 6. | Pembangunan pos ronda |
| 7. | Pembangunan drainase |
| 8. | Perbaikan MDA |
| 9. | Batas desa |
| 10. | Semenisasi jl.jambu |
| 11. | Semenisasi jl.indramayu |
| 12. | Lampu penerangan jln jambu |
| 13. | Pembuatan jalan baru |
| 14. | Pengembangan pertanian |
| 15. | Pupuk sawit berkualitas |
| 16. | Bibit sawit berkualitas |
| 17. | Penyuluhan PHBS |
| 18. | Pembuatan tempat pembuangan sampah |
| 19. | Pembuatan parit jl.manggis |

Sumber : Hasil MusrenbangDes Petai Baru Tahun 2016

Tabel di atas merupakan usulan masyarakat desa Petai Baru pada musrenbangdes tahun 2016, pada tahun 2016 usulan yang di sampaikan masyarakat berkurang dari tahun sebelumnya, hal ini kemungkinan terjadi di karenakan partisipasi masyarakat berkurang dari

tahun sebelumnya, selain itu kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah desa yang sebelumnya hanya mampu merealisasikan empat usulan.

Selain itu Desa Petai Baru juga memiliki permasalahan lainnya yakni hasil dari realisasi pembangunan ini, tidak semua usulan dari masyarakat dapat terealisasikan karena memang harus mempertimbangkan hal yang harus diutamakan terlebih dahulu, diantara yang dapat terealisasikan adalah pengembangan puskesmas di beberapa dusun dan jalan di Desa Petai Baru. Berikut tabel Realisasi pembangunan desa Petai Baru tahun 2015-2016.

Tabel 4
Realisasi Pembangunan Desa Petai Baru Tahun 2015-2016

| No | Realisasi | Anggaran | Tahun | Realisasi | Anggaran | Tahun |
|----|------------------------|---------------|-------|---------------------------|---------------|-------|
| 1 | Pembangunan Puskesmas | 245.290.000 | 2015 | Semenisasi Jl. Jambu | 325.000.000 | 2016 |
| 2 | Semenisasi Jl. Manggis | 450.000.000 | 2015 | Semenisasi Jl. Jeruk | 375.000.000 | 2016 |
| 3 | Pembangunan KUD | 300.000.000 | 2015 | Pembangunan Balai Desa | 450.000.000 | 2016 |
| 4 | Pembangunan Paud | 250.000.000 | 2015 | Pembangunan Lapangan Voli | 67.000.000 | 2016 |
| | | 1.245.290.000 | 2015 | | 1.217.000.000 | 2016 |

Sumber : Kantor Desa Petai Baru

Pada tabel realisasi pembangunan desa petai baru pada tahun 2015 dan 2016 Desa Petai Baru menggunakan anggaran sebanyak Rp 2.462.290.000. Pembangunan tersebut terjadi pada tahun 2015 dan 2016, delapan realisasi pembangunan tersebut terjadi atas beberapa usulan dari masyarakat dan pemerintah Desa Petai Baru, namun masih juga ada

beberapa usulan yang masih belum terealisasi oleh pemerintah desa, banyak usulan masyarakat desa yang belum terealisasi.

Penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana proses perencanaan pembangunan infrastruktur Desa petai Baru. Peneliti memilih Desa Petai Baru karena ada permasalahan-permasalahan yang penulis uraikan diatas. Desa Petai Baru belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kordinasi yang kurang baik kepada pemerintah daerah untuk dapat pembagian anggaran untuk pembangunan, serta peran masyarakat yang masih kurang berkontribusi dalam Musrenbangdes. Fenomena yang terjadi di Desa Petai Baru akibat rendahnya realisasi pembangunan dan partisipasi masyarakat yaitu:

1. Tingkat kesadaran masyarakat yang telah diundang dalam mencapai delibrasi pada saat Musrenbangdes rendah dilihat dari tingkat kehadiran pada saat Musrenbang.
2. Pemerintah desa sangat sulit memperjuangkan aspirasi yang telah diusulkan dalam musrenbangdes untuk terlaksana.
3. Pemerintah desa tidak dapat mengoptimalkan anggaran desa.

Dilihat dari fenomena diatas masyarakat belum sadar akan pentingnya delibrasi dalam merealisasikan pembangunan dan memajukan desa, kemudian pemerintah desa yang belum dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat desa. Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Deliberasi Perencanaan Pembangunan Di Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten**

Kuantan Singingi Tahun 2015-2016”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbangdes semakin menurun dan dampak pembangunan infrastruktur. Dari masalah pokok tersebut dapat dijabarkan pertanyaan spesifik sebagai berikut:

1. Bagaimana musyawarah perencanaan pembangunan Dusun di Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2015-2016.
2. Bagaimana musyawarah perencanaan pembangunan Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2015-2016.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses deliberasi musyawarah dusun dan hasil Musrenbang Dusun Desa Petai Baru .
2. Untuk mengetahui deliberasi musrenbangdes dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa Petai Baru.

KERANGKA TEORI

1. Deliberasi

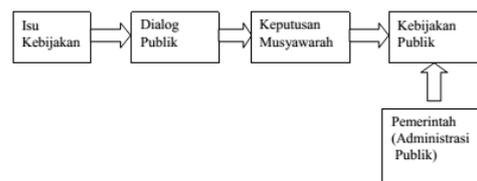
Teori Demokrasi Deliberatif adalah suatu pandangan bagaimana mengaktifkan individu dalam masyarakat sebagai warga nrgara untuk berkomunikasi yang terjadi pada level warga itu mempengaruhi

pengambilan keputusan publik pada level sistem politik.

Arti yang lebih formal deliberasi mengandung aspek argumentatif informasional, dalam (reflective) berarti bahwa preferensi, pandangan, dan keputusan yang dianggap sudah sudah tetap pada model-model agregatif dianggap mudah berubah dalam deliberasi. Karena itu autentias menjadi perhatian utama: kontrol demokratif dalam arti ideal harus substantif, bukan simbolis, mencakup komunikasi sukarela diantara peserta yang cakap.

Proses analisis kebijakan publik model “musyawarah” ini jauh berbeda dengan model-model teknokratik, karena peran dari analis kebijakan “hanya” sebagai fasilitator agar masyarakat menemukan sendiri keputusan kebijakan atas dirinya sendiri. Prosesnya dapat disederhanakan sebagai berikut.

Gambar 1
Proses Deliberatif



Empat macam karakteristik dari demokrasi deliberatif. Karakteristik pertama merujuk pada tersedianya ruang bagi publik dalam berbagai bentuk untuk turut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Karakteristik kedua berkaitan dengan aksesibilitas semua warga untuk berproses dalam memberikan pertimbangan yang sehat. Karakteristik ketiga dikatakan bahwa proses ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah keputusan yang mengikat pada periode waktu

tertentu. Karakteristik keempat berkaitan dengan prosesnya yang dinamis, begitu juga dengan keputusannya yang bergantung pada dialog yang dilakukan. Dari keempat karakteristik tersebut dapat dikatakan bahwa demokrasi deliberasi adalah bentuk dari pemerintahan yang memiliki warga yang bebas dan setara, dalam konteks ini adalah menyampaikan pendapat.

2. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan desa sebenarnya sudah menjadi agenda rutin yang harus dilaksanakan pemerintah desa setiap tahunnya. Namun demikian ada beberapa yang menjadi persoalan bersama diantaranya adalah.

1. Apakah proses perencanaan pembangunan sudah merupakan hal yang penting bagi masyarakat dimana perencanaan pembangunan merupakan persoalan hajat hidup masyarakat desa sehingga masyarakat benar-benar bergairah dan ikut berperan secara efektif dalam proses perencanaan ?
2. Apakah perencanaan sudah menjawab persoalan hidup masyarakat terkait dengan kecukupan sandang , pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kebutuhan air bersih & sanitasi, kecukupan energi dan lain sebagainya ?
3. Apakah dalam proses perencanaan pembangunan desa, melibatkan seluruh unsur masyarakat termasuk perlibatan kaum perempuan ?
4. Apakah perencanaan pembangunan desa sudah mengacu pada peraturan perundang undangan yang ada ?

5. Apakah kegiatan yang dilaksanakan didesa sudah mengacu pada perencanaan desa yang ada dalam hal ini RPJM Desa dan RKP Desa ?

Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang ada didesa persoalan tersebut muncul disebabkan beberapa faktor diaantaranya adalah:

- a. Faktor pemahaman masyarakat yang kurang terkait dengan alur dan tahapan proses perencanaan.
- b. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami tentang alur dan tahapan proses perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat maksimal sesuai dengan aturan perundangan yang ada.

Menjawab persoalan-persoalan tersebut diatas, maka perlu adanya sosialisasikepada seluruh lapisan masyarakat agar memahami alur dan tahapan proses perencanaan di desa. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah dibukanya peluang bagi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah melalui musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat keluarahan sampai tingkat nasional (Rahardjo Adisasmita, 2013:64).

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang bermaksud mencari fakta sebanyak-banyaknya untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Namun pada prinsipnya, dalam metode kualitatif ini, peneliti harus terjun langsung menjadi partisipasi aktif bersama responden. Walaupun demikian peneliti harus ingat dan sadar bahwa peneliti berbeda posisi dengan

responden, sehingga dituntut tetap selalu konsisten. Untuk itu tingkat objektivitas bagi peneliti harus tetap selalu terjaga, dengan cara mencatat data dan fakta, tanpa cepat membuat interpretasi.

Penelitian ini beralokasi di kawasan, Desa Petai Baru Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan menetapkan kawasan Kecamatan Singingi sebagai lokasi sekaligus objek penelitian adalah karena Singingi adanya perbedaan harga tanah antar desa yang sangat signifikan.

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa: “ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain, sehingga dapat difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deliberasi Perencanaan Pembangunan Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016

Proses analisis kebijakan publik medel “musyawarah” ini jauh berbeda dengan model-model teknokratik, karena peran dari analisis kebijakan “hanya” sebagai fasilitator agar masyarakat menemukan sendiri

keputusan kebijakan atas dirinya sendiri. Prosesnya memalui beberapa tahap diantaranya isu kebijakan, dialog publik, keputusan musyawarah, kebijakan publik, serta pemerintah.

1. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun

Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Dusun sampai tingkat Pusat. Dari hasil Musrenbang Dusun, kemudian dimusyawarahkan lagi pada tingkat Desa, untuk disusun menurut skala prioritasnya. Prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut: Masalah Pengentasan Kemiskinan, Masalah Kesehatan, Masalah Pendidikan, Masalah Pertanian, Masalah Kerajinan/Industri Kecil.

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun Suka Jadi

Pengertian Musyawarah Dusun adalah Rembug Warga yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Musrenbang desa, untuk mendapatkan bahan masukan rencana pembangunan Desa/Kelurahan secara partisipatif. Karena desa sudah memiliki Perdes RPJM Desa. maka, Rembug warga/musdus pada dasarnya hanya melaksanakan pengkajian terhadap RPJM Desa serta menginventarisir perkembangan kebutuhan masyarakat (need assesment).

Musdus dilaksanakan setiap bulan Januari paling lambat akhir minggu ke III. Dapat dilaksanakan pada hari kerja maupun diluar hari kerja, siang hari maupun malam hari namun tidak boleh dilaksanakan pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan (mengacu pada Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 8 ayat (1).

Tempat penyelenggaraan Musdus dapat berupa gedung balai desa, gedung pertemuan desa, lapangan desa atau gedung sekolah yang ada di desa atau tempat lainnya yang layak. Tempat penyelenggaraan musyawarah harus berada di wilayah desa. (Permendes 2/2015 Pasal 9).

b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun Madu Raja

Musdus diikuti oleh Perwakilan dari RW 004 dan RW 005 Petai Baru. Musdus dihadiri oleh Ketua RW, RT, Ketua Pemuda, Kader Posyandu, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kelompok Perempuan dan Komunitas Pemuda Peduli Desa (dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang). Kepala Desa dan Ketua BPD Hasrul Aswin bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Ketua BPD menyampaikan bahwa perencanaan harus dilakukan bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Musyawarah rencana pembangunan di Dusun Madu Raja ini biasa terjadi pada bulan Januari sebelum diadakannya musyawarah rencana di tingkat selanjutnya, kepala Dusun Madu Raja ini yang biasa memimpin untuk dilaksanakannya rembuk warga, tempat atau lokasi musyawarah ini biasa dilakukan di rumah salah satu warga dan biasanya sekalian dilakukan pada saat berlangsungnya acara pengajian di rumah warga Dusun Madu Raja.

2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Petai Baru

Pada bagian ini penulis akan berbicara mengenai Proses musrenbangdes, Aktor/Tokoh yang terlibat dalam musrenbangdes, dialog perencanaan pembangunan dan

realisasi pemerintah desa dalam musrenbang desa petai baru dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan Desa.

a. Proses Musrenbangdes Desa Petai Baru

Musyawarah perencanaan pembangunan desa pada dasarnya adalah mekanisme perencanaan pembangunan desa yang bersifat dari bawah ke atas (bottom up) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan ditingkat desa yang menemukan dan menggali masalah, potensi, kebutuhan, maupun tantangan eksternal. Perencanaan dari bawah yang dimaksud adalah proses penyusunan rencana pembangunan desa harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara umum, tahapan-tahapan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan desa adalah: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan penutup.

b. Aktor/Tokoh Yang Terlibat Dalam Musrenbang Desa Petai Baru

Peneliti melihat deliberasi tidak terjadi pada musrenbangdes, hal ini dilihat dari tingkat kehadiran, usulan dari masyarakat dan wawancara-wawancara yang dilakukan peneliti kepada informen penelitian. Dari data kehadiran tahun 2015-2016 dapat dilihat tidak tercapai setengah dari undangan yang disebar setiap tahunnya, pada tahun 2015 hanya 30 orang yang hadir dan tahun 2016 lebih sedikit yaitu 17 orang yang hadir dalam musrenbang terlebih mayoritas yang hadir hanya aktor formal.

Hasil observasi dan wawancara penulis, dalam menyampaikan aspirasi kepentingannya, aktor/tokoh yang

terlibat dalam murenbang Desa Peti Baru memiliki benturan-benturan pemikiran yang terjadi di dalamnya. Benturan yang dimaksud disini adalah benturan pemikiran dalam hal menetapkan prioritas. Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Petai Baru penetapan prioritas pembangunan desa hanya di ikuti oleh aktor/tokoh formal yang ada di desa tanpa diikuti aktor informal.

c. Dialog Perencanaan Pembangunan Dan Realisasi Pemerintah Desa Dalam Musrenbang Desa Petai Baru

Wujud ruang baru bagi kesuksesan musrenbangdes adalah pembentukan sebuah forum deliberatif, dimana warga bicara berdasarkan tematisasi isu-isu yang bersumber pada pengetahuan dan kapasitas warga. Disisi lain, perhatian dan bentuk responsif pemerintah desa pada musrenbangdes itu cukup membuktikan bahwa tidak ada kekuasaan yang memiliki kesempurnaan, selalu memerlukan interaksi sehari-hari dengan para warga, dan menjadikan pendapat-pendapat mereka sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Tabel 5
Usulan Yang Tidak Terealisasi Dalam Pembangunan Desa Petai Baru Pada Tahun 2015-2016

| NO | JUMLAH USULAN BIDANG | | USULAN YANG TIDAK TEREALISASI | |
|----|----------------------|--------------------|-------------------------------|------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 1 | Fisik (14) | Fisik (8) | 12 | 6 |
| 2 | Perhubungan (1) | Perhubungan (1) | 1 | 1 |
| 3 | Pendidikan (1) | Pendidikan (2) | 0 | 2 |
| 4 | Kesehatan (2) | Kesehatan (1) | 2 | |
| 5 | Ekonomi Kerakyatan | Ekonomi Kerakyatan | 3 | 3 |

| | (3) | (4) | | |
|---------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 6 | Perumahan dan pemukiman (-) | Perumahan dan pemukiman (-) | - | - |
| 7 | Pemuda dan Olahraga (1) | Pemuda dan Olahraga (1) | 0 | 1 |
| 8 | Sosial (2) | Sosial (2) | 2 | 1 |
| 9 | Kebudayaan (-) | Kebudayaan (-) | - | - |
| 10 | Sarana Ibadah (-) | Sarana Ibadah (-) | - | - |
| Tot al | 24 Usulan Pembangunan | 19 Usulan Pembangunan | 20 | 15 |

Sumber: Olahan Penulis 2017

Keinginan dan harapan masyarakat dapat dilihat dari kepetingan yang dibawa oleh aktor informal seperti unsur-unsur masyarakat yang terdiri dari : Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama dan juga Perwakilan Kelompok Perempuan, tidak terakomodasi. Realisasi pembangunan yang dihasilkan secara keseluruhan adalah kepentingan yang dibawa oleh aktor formal yang terdiri dari : Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan juga Lembaga-Lembaga Desa. Hal ini mengindikasikan bahwa forum deliberasi yang ada di Desa Petai Baru, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa hal tersebut dapat dikenali dari realisasi pembangunan desa yang tidak mengalami peningkatan.

d. Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa

Pada bagian ini penulis akan berbicara mengenai bagaimana mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam hal ini

pemerintah harus melibatkan dan mendorong keterlibatan masyarakat dengan beberapa upaya sehingga mereka dapat berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Namun partisipasi ini akan berdampak negatif jika partisipasi dari kaum elit ini yang notabene adalah orang-orang yang berepengaruh didesa akan menutup kesempatan bagi warga lain untuk ikut serta dalam musrenbangdes. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah: kepemimpinan, komunikasi dan pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Rembug warga merupakan tahap pra musrenbangdes dan wajib dilakukan sebelum diadakannya musrenbangdes, adapun semua warga dusun berhak hadir seperti tokoh masyarakat, agama, pemuka adat, perwakilan perempuan, tokoh pemuda, perwakilan kelompok profesi, perwakilan masyarakat miskin.
2. Perencanaan pembangunan dalam proses musyawarah pembangunan Desa Petai Baru yaitu banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa mereka telah memberikan pendapatnya melalui forum-forum lain atau saat adanya acara dan mereka mempunyai kesibukan mengurus ladang sawit sehingga mereka tidak ikut dalam Musrenbangdes. Proses musrenbangdes masih

terkesan formalitas dan Aktor/Tokoh yang terlibat dalam Musrenbangdes Desa Petai Baru masih didominasi oleh aktor formal dan minim sekali melibatkan aktor informal. Deliberasi perencanaan pembangunan Desa Petai Baru masih belum terjadi.

SARAN

Untuk menciptakan Deliberasi dalam perencanaan pembangunan Desa yang lebih baik, maka ada beberapa saran yang mungkin perlu dipertimbangkan:

1. Untuk Pemerintah Kecamatan
Bagi pemerintah kecamatan disarankan untuk lebih peka dan responsif dalam menanggapi unsur kepentingan yang dibawa oleh pemerintah desa. Agar unsur kepentingan tersebut dapat terealisasi dan terakomodasi supaya berdampak signifikan pada pembangunan desa.
2. Untuk Pemerintah Desa
Bagi pemerintah desa disarankan untuk kembali mengaktifkan lembaga-lembaga desa yang semoat vakum agar jenjang partisipasi kemitraan dapat dilaksanakan pada musrenbangdes. Pemerintah desa kedepannya juga harus melibatkan lebih banyak unsur masyarakat yang ada di desa.
3. Untuk Unsur Masyarakat Desa
Bagi unsur masyarakat desa disarankan untuk lebih mengontrol kembali kinerja pemerintah desa, lebih aktif lagi dalam menyampaikan agregasi/artikulasi kepentingan yang dibawa, agar kepentingan yang merupakan kebutuhan masyarakat tersebut dapat terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gafar, Affan. 2002. *Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit*. Yogyakarta: Polgov UGM.
- Juliantara, Dadang. 2003. *Pembaruan desa bertumpu pada angka terbawah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khairudidin. 1992. *Pembangunan masyarakat*. Yogyakarta: Loberty.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nyoman, Surmayadi. 2007. *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Rasyid, Ryaas. 1998. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarif Watampone. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Sumpeno, Wajudin. 2011. *Renacana Pembangunan jangka menengah Desa*. Aceh: World Bank.
- Suwarso dan Alvin, Y, So. 2000. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Pustaka CP3ES Indonesia.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offest.
- Trisantoro, Bambang. 2011. *Pedoman penyelenggaraan pemerintah desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Yansen . 2014. *Revolusi Dari Desa Dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya Kepada Rakyat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Clogapps Diponegoro University, Semarang.

Jurnal

- Reguna Ayu “Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan”
- Iqtisadulla Muttaqin “Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau Dalam Pengelolaan PT Riau Petroleum Tahun 2013-2015”
- Tauhid Mahrifatullah “Kebijakan Pemabangunan Perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan”

Undang-Undang

- UU No.6 Tahun 2 014 Tentang Desa
Peraturan Menti Desa Nomor 2
Tahun 2015, Pasal 23 Ayat 1,

Tentang Pedoman Tata Terib
Dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan
Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi No 13

Tahun 2010 Tentang
Percanaan Pelaksanaan
Pembangunan dan
Pemanfaatan Serta
Pendayagunaan Kawasan
Pedesaan